Potret Perempuan dalam Ranah Politik di Indonesia

Sarifa Suhra Dosen IAIN Bone syarifah_suhra@yahoo.com

Abstract: This paper examines the portrait of women in the realm of politics in Indonesia, using qualitative descriptive, then the analysis of the results showed that the involvement of women in the realm of politics in Indonesia, recorded significant gains the names of women who contribute in political activity both before and after Indonesia became independent from the era of the Kingdom until it formed into independent and sovereign. A physical struggle against colonizers have capture names such as Cut Nyak Dien, Martha Tiahahu, Yolanda Maramis and so on. In the emerging national movement name Rasuna Said and Trine. While RA Kartini, Dewi Sartika and had carved their names as people who fought for the rights of women to acquire education and position in the realm of political equals with men. The new order era and the era of reform has broadened the way for women to be actively engaged in all aspects of life including politics. Various forms of political struggle was the Group of women, such as Parliament, the Cabinet, political parties, NGOs, and so on. In Indonesia it is generally the involvement of women in politics is quite high and significant proven in the election of regional heads in unison 2018 women win many politicians both at the level of the Governor and Governor or mayor.

Keywords: women, politics, Parliament, Cabinet, political parties, NGOs

Pendahuluan

Sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, peran perempuan sudah dalam dunia politik sudah ada, karena Sejarah Indonesia mencatat seorang tokoh bernama Gayatri Rajapatni (Ratu di atas segala Ratu) yang wafat pada tahun 1350 yang diyakini sebagai perempuan di balik kebesaran Kerajaan Majapahit. Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Budha yang di mata banyak orang tidak mungkin memberikan ruang bagi perempuan untuk berpolitik. Tetapi hasil kajian yang dilakukan oleh mantan Dubes Canada untuk Indonesia (Earl Dark, ia juga sebagai sejarawan) membuktikan, bahwa puncak kejayaan Majapahit tercapai karena peran sentral Gayatri, istri Raden Widjaya, ibunda ratu ketiga Majapahit, Tribhuwanatungga-dewi, sekaligus nenek dari Hayam Wuruk, raja terbesar di sepanjang sejarah Kerajaan Majapahit. Gayatri tidak pernah menjabat resmi sebagai ratu, tetapi peran politiknya telah melahirkan generasi politik yang sangat luar biasa di Nusantara kala itu. 45

⁴⁵Muh. Jamil, http://www.hukumpedia.com/JAMILNCERA/peran-perempuan-dalam-dunia-politik-dijamin-undang-undang, didownlod pada tanggal 30 September 2016

Sejarah telah memberikan fakta-fakta tentang perempuan memiliki peran yang mewarnai berbagai dimensi kehidupan. Dengan demikian profesional tidak tergantung dari sudut jenis kelamin melainkan ditentukan oleh kemampuan setiap individu. Berdasarkan kenyataan sejarah tersebut, maka perempuan tidak hanya cukup dengan belajar teori saja, namun harus mampu memanfaatkan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sebagai perempuan-perempuan yang mandiri dan profesional.

Fakta-fakta sejarah mengungkapkan, beribu tahun sebelum Islam datang khusnya di zaman Jahiliyah perempuan dipandang tidak memiliki kemanusiaan yang utuh dan oleh karenanya perempuan tidak berhak bersuara, tidak berhak berkarya, dan tidak berhak memiliki harta apalagi memimpin yang merupakan ranah politik dan didominasi oleh kaum laki-laki. Karena itu, merendahkan perempuan adalah budaya jahiliyah yang harus ditinggalkan. ⁴⁶Karena itulah pemberdayaan potensi perempuan harus terus dikumandangkan agar terwujud kesejahteraan yang merata bagi seluruh alam.

Terkait dengan pemberdayaan potensi Sudarwan Danim menulis bahwa manusia adalah makhluk sosial yang harus dapat hidup bersama manusia lainnya dengan menempati ruang dan memanfaatkan sumber alam secara adil yang terbatas jumlahnya. Selaku makhluk sosial, manusia saling membutuhkan di satu pihak dan bersaing untuk mengakses sumber-sumber alam di pihak lainnya pada spectrum wacara persaingan itulah dimensi manusiawi sejati mutlak diperlukan untuk tidak melahirkan interaksi manusia berbasis hukum rimba, seperti yang kuat mengalahkan yang lemah atau semua dianggap beres degan uang atau kekuasaan. Karena memang, secara hakiki masing-masing manusia mempunyai ruang kepribadian dan ruang kemerdekaan pribadi.⁴⁷

Berangkat dari fenomena tersebut, maka penulis bermaksud mengelaborasi lebih jauh tentang potret perempuan dalam ranah politik di Indonesia.

Pembahasan

Politik pada hakikatnya adalah kekuasaan (*power*) dan pengambilan keputusan yang lingkupnya sangat luas, dimulai dari institusi keluarga sampai ke institusi politik formal tertinggi. Dengan pengertian tersebut, politik menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan negara,

 $^{^{46}}$ Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan keadilan Gender* (Cet. I; Yogyakarta: Nauvan Pustaka, 2014), h. 67

⁴⁷Sudarwan Danim, *Agenda Pembaruan Sistem pendidikan* (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 12-13

kekuasaan, proses pengambilan keputusan (decision making), proses perumusan kebijakan (policy formulation), dan alokasi sumber daya (resource allocation). Pengertian politik pada prinsipnya juga meliputi masalah-masalah pokok dalam kehidupan sehari-hari yang selalu melibatkan kaum perempuan. Peran politik perempuan antara lain dapat dilihat dari keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan publik, proses penyelenggaran negara, dan politik perwalikan.⁴⁸

Dalam berbagai wacana, politik secara sederhana dirumuskan sebagai cara mengatur urusan-urusan kehidupan bersama untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Dengan begitu politik sesungguhnya adalah ruang maha luas, seluas ruang kehidupan itu sendiri. Ia muncul dalam ruang domestik maupun publik, ruang kultural maupun struktural, personal dan komunal. Tetapi penyebutan politik dalam pikiran banyak orang dewasa ini telah menyempit menjadi istilah bagi politik praktis, politik struktural, perebutan kekuasaan untuk kepentingan diri atau sebagian orang dan sesaat, bukan lagi untuk kepentingan masyarakat luas dan untuk masa depan yang panjang. 49 Lebih lanjut Abu Syuqqah sebagai dikutip oleh Syafiq Hasyim, menjelaskan bahwa keterlibatan perempuan dalam politik itu boleh, ia menyatakan bahwa hal tersebut harus dikembalikan kepada acuan kaidah ushuliyyahyang menyatakan bahwa segala sesuatu itu pada asalnya dibolehkan, sejauh tidak ada ketentuan yang melarang. Pendapat ini juga senada dengan pendapat al-Siba'i. Alasan kebolehan ini menurut al-Siba'i, didasarkan pada tugas-tugas yang diemban oleh mereka, yaitu membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pemerintahan.⁵⁰

Dunia pendidikan telah merambah keseluruh sendi-sendi kehidupan umat manusia, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan perkembangan dan kebutuhan hidup mereka, tidak terkecuali masalah pendidikan politik yakni; perilaku manusia yang berkaitan dengan urusan pengaturan, pengelolaan, pengendalian, pemanfaatan, penentuan kebijakan, siasat atau kecerdikan akal dalam mengatur kekuasaan dan ketatanegaraan.⁵¹Memperhatikan fungsi

⁴⁸Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan dalam Islam* (Cet. I; Jakarta: Megawati Insitute, 2014), h. 72

⁴⁹Nuruzzaman, dkk. *Islam Agama Ramah Perempuan* (Cet. IV; Yogyakarta: LKis, 2013), h. 163-164

⁵⁰Syafiq Hasyim, Hal-Hal yang Tak Terpikirkan tentang isu-isu Keperempuanan dalam Islam (Cet. I; Bandung: Mizan, 2001), h. 208-209

51 Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2011), h. 449.

pendidikan yang demikian luasnya, maka keterlibatan perempuan merupakan suatu keniscayaan. Dengan kata lain kaum perempuan juga memiliki kemerdekaan dalam dunia politik sebagaimana kaum laki-laki. Sekalipun keterlibatan perempuan dalam dunia politik di kalangan umat Islam masih merupakan persoalan polimik yang masih diperbincangkan sampai sekarang ini. Sebagian umat Islam yang berpikir tradisoinal tidak memberikan ruang bagi perempuan terjun ke dunia politik yang dianggap menyalahi koadratnya, di lain pihak juga banyak yang menyetujuinya karena masuk pada ranah persoalan gender yang justeru mendapat angin segar dari berbagai kalangan khususnya pemerintah melalui program PUG (Pengarus Utamaan Gender) dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat.

Terlepas dari perbedaan pandangan tersebut, perempuan merupakan bagian ciptaan Allah swt. yang memiliki hak yang sama dengan laki-laki beramal saleh guna memperoleh kehidupan yang lebih baik, 52 untuk mencapai kehidupan lebih baik inilah perempuan terjun berkarier di berbagai bidang seperti di bidang pendidikan, hukum, bisnis dan menjadi politisi. Dengan demikian, keberadaan perempuan dalam ranah politik menjadi politisi bukan sekedar pencerdasan secara sosial intelektual, tetapi juga memberi pemahaman bagaimana suatu komunitas terorganisasi dalam suatu bingkai kebersamaan membangun peradaban yang lebih bermartabat dan bermanfaat untuk orang banyak minimal manfaatnya dapat dirasakan oleh perempuan yang diwalikilinya.

Usaha-usaha memahami nilai-nilai yang melekat pada perempuan merupakan konstruksi sosial yang melibatkan berbagai unsur kekuatan, termasuk di dalamnya memaknai dan memahami masyarakat.⁵³ Suara-suara perempuan harus terus didengar dan direkam, kemudian menempatkan mereka pada posisi yang strategis dalam berbagai ruang sosial, misalnya; rumah, sekolah publik, pasar, kantor termasuk dalam dunia politik.

Dalam berbagai bentuk diskursus tampak bahwa keterlibatan perempuan dalam dunia politik masih terbatas dibanding dengan kaum laki-laki yang jauh sebelum Indonesia meredeka telah banyak mengenyam pendidikan dan telah banyak yang melibatkan diri pada dunia politik.

⁵²O.S. Al-Nahl/16: 97.

⁵³Rukmina G. Manoppo, *Meretas Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam* (Cet. I; Malang: Universitas Negeri Malang, 2012), h. v.

Karena itu, perempuan harus berusaha mengejar ketertinggalannya, yang sampai sekarang masih dirasakan inbasnya dalam berbagai ruang publik, termasuk dalam dunia politik. Wacana kesetaraan gender yang kini merambah keseluruh relung-relung kehidupan manusia modern, merupakan kesempatan yang paling strategis bagi kaum perempuan memperbaiki posisinya mengambil bagian dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Kehadiran perempuan dalam ranah publik secara lebih massif dalam panggung politik struktural diharapkan akan manpu merumuskan kebijakan-kebijakan negara yang dapat memberdayakan perempuan-perempuan miskin, menghapus kultur diskriminatif dan menghentikan kekerasan terhadap perempuan yang masih berlangsung secara eskalatif, baik di ruang domistik maupun di ranah publik. 54 Sebagian besar masyarakat Indonesia sekarang sudah sadar akan pentingnya pendidikan untuk meningkatkan hidup dan kehidupan. Telah diakui semua kalangan bahwa pendidikan Islam di Indonesia banyak menghasilkan tokoh-tokoh nasional maupun internasional, baik yang bergerak di bidang pendidikan 55, politik keagamaan dan bidang-bidang lainnya.

Sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, peran perempuan sudah dalam dunia politik sudah ada, karena Sejarah Indonesia mencatat seorang tokoh bernama Gayatri Rajapatni (Ratu di atas segala Ratu) yang wafat pada tahun 1350 yang diyakini sebagai perempuan di balik kebesaran Kerajaan Majapahit. Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Budha yang di mata banyak orang tidak mungkin memberikan ruang bagi perempuan untuk berpolitik. Tetapi hasil kajian yang dilakukan oleh mantan Dubes Canada untuk Indonesia (Earl Dark, ia juga sebagai sejarawan) membuktikan, bahwa puncak kejayaan Majapahit tercapai karena peran sentral Gayatri, istri Raden Widjaya, ibunda ratu ketiga Majapahit, Tribhuwanatungga-dewi, sekaligus nenek dari HayamWuruk, raja terbesar di sepanjang sejarah Kerajaan Majapahit. Gayatri tidak pernah menjabat resmi sebagai ratu, tetapi peran politiknya telah melahirkan generasi politik yang sangat luar biasa di Nusantara kala itu. ⁵⁶

⁵⁴Rukmina G. Manoppo, *ibid.*, h. x

⁵⁵Lihat Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*. (Cet. II; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), h. 35

⁵⁶Muh. Jamil, http://www.hukumpedia.com/JAMILNCERA/peran-perempuan-dalam-dunia-politik-dijamin-undang-undang, didownlod pada tanggal 30 September 2016

Contoh lainnya terkait partisipasi perempuan dalam politik, pemerintahan dan pendidikan terlihat pula di Bone yang telah terjadi cukup lama. Hal tersebut terbukti sejak Bone dalam bentuk kerajaan setidaknya ada beberapa perempuan yang pernah memegang kendali kepemimpinan tertinggi (Arungpone atau Mangkau') tercatat dalam sejarah ada 4 yaitu; Sultanah Zainab Zulkiyahtuddin yang biasa juga disebut We Bataritoja Datu Talaga Arung Timurung, yang juga merupakan Raja Bone ke-17 yang memerintah dari tahun 1704-1715. Sultanah Zainab Zulkiyahtuddin diangkat menjadi Mangkau' ri Bone pada tanggal 17 Oktober 1704.⁵⁷ Selanjutnya I-Danraja siti Nafisah Karaeng Langelo yang berkuasa dari tahun 1738-1741. Raja perempuan lainnya adalah We Maniratu Arung Data memerintah dari tahun 1823-1835 Arung Data naik tahta menggantikan saudaranya yang bernama To Appatunru MatinroE ri Ajabbenteng yang menjadi Raja pada tahun 1812-1823. Arung Data merupakan saudara Arung palakka ini dikenal sebagai Raja yang anti VOC. Semasa pemerintahannya, We Maniratu Arung Data dikenal sebagai pelopor bagi sebagian raja di Sulawesi Selatan yang menolak pembaruan perjanjian Bungaya. Sebagai akibat pembangkangan, maka pada tanggal 14 Maret 1824, pasukan VOC di bawah pimpinan jenderal Van Goen menyerang kerajaan Bone melalui pantai Bajoe. Untuk memperkuat pasukannya melawan VOC, We Maniratu Arung Data membentuk pasukan perempuan yang dilengkapi dengan senjata lawida, semacam alat tenun yang runcing. Bahkan Arung Data sendiri langsung ke medan perang bersama pasukannya.⁵⁸

Raja Bone perempuan lainnya yang tercatat dalam sejarah adalah I Banri Gau Paduka Sri Sultanah Fatima MatinroE ri Bola Mappere'na. semasa hidupnya Sri Sultanah Fatima sangat memperhatikan sektor budaya dan pendidikan, juga sektor agama diantara kebijakannya adalah merubah *baju bodo* (baju tradisional suku Bugis khusus bagi perempuan) dari berukuran pendek menjadi lebih panjang agar dapat menutup aurat. Pasca pemerintahannya digantikan oleh Raja Bone terakhir yaitu La Pawawoi Karaeng Sigeri MatinroE ri Bandung. ⁵⁹ Cukup menarik mengenai fakta kepemimpinan Raja perempuan di Bone karena semuanya beragama Islam.

⁵⁷Krishna Bayu Adji dan Sri Wintala Achmad, *Perempuan-Perempuan Tangguh Penguasa Tanah Jawa* (Cet. I; Yogyakarta: Araska, 2018), h. 213

⁵⁸Krishna Bayu Adji dan Sri Wintala Achmad, *Perempuan-Perempuan Tangguh Penguasa Tanah Jawa*, h. 215-216

⁵⁹Krishna Bayu Adji dan Sri Wintala Achmad, *Perempuan-Perempuan Tangguh Penguasa Tanah Jawa*, h. 216

Terkait dengan keterlibatan perempuan dalam berbagai hal, Hamka menulis bahwa perempuan-perempuan yang terhormat dan mulia banyak tersebut dalam al-Qur'an. Diantara perempuan tersebut ada yang mendapat wahyu istimewa dari Allah, yaitu ibunda nabi Musa, yang diperintahkan Allah untuk membuang putranya di dalam peti dalam arus sungai Nil, juga Maryam ibu nabi Isa dalam asuhan nabi Zakariya kemudian dengan kehendak Allah Maryam melahirkan nabi Isa tanpa ayah.⁶⁰

Data historis para perempuan hebat tersebut, memberikan legitimasi atas seruan nabi tentang pentingya pendidikan bagi laki-laki dan perempuan. Sejarah memberikan fakta-fakta perempuan memiliki peran yang mewarnai berbagai dimensi kehidupan. Dengan demikian, profesionalitas tidak bergantung dari sudut jenis kelamin tetapi ditentukan oleh kemampuan setiap individu. Berdasarkan kenyataan sejarah tersebut, bagi Atiyyah, perempuan (muslimah) tidak hanya cukup dengan belajar secara teoritis saja, namun harus mampu memanfaatkan dan mengaplikasikan dalam bidang kehidupan sebagai seorang yang professional.

Data tersebut di atas juga merupakan bentuk pengakuan atas hak perempuan dalam mengenyam pendidikan yang tiada batas. Ada kebebasan bagi perempuan untuk belajar dari mulai pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, sesuai minat masing-masing individu perempuan. Pada dasarnya ruh pendidikan adalah "kebebasan dan demokrasi" yang tidak memandang jenis kelamin. Dengan asumsi bahwa setiap manusia (perempuan/laki-laki) mempunyai potensi yang harus diasah melalui pendidikan agar bermanfaat untuk membangun dunianya.

Sejarah perjuangan kaum perempuan Indonesia juga telah mencatat nama-nama perempuan yang turut andil dalam aktivitas politik. Perjuangan fisik melawan penjajah telah mengabadikan nama-nama seperti Cut Nyak Dien, Martha Tiahahu, Yolanda Maramis dsb. Dalam pergerakan nasional muncul nama Rasuna Said dan Trimurti. Sedangkan RA Kartini dan Dewi Sartika, telah terpahat nama-nama mereka sebagai orang yang memperjuangkan hak-hak perempuan untuk memperoleh pendidikan yang setara dengan pria. Era Orde Baru telah melempangkan jalan bagi para perempuan untuk aktif berkiprah dalam segala aspek kehidupan

⁶⁰Hamka, Buya Hamka Berbicaara tentang Perempuan (Cet. V; Jakarta: Gema Insani, 2014), h. 5

termasuk politik. Berbagai bentuk perjuangan politik telah digeluti para perempuan, seperti parlemen, kabinet, partai politik, LSM, dan sebagainya.Namun kesimpulan yang diambil delegasi 27 negara yang hadir dalam sebuah konferensi perempuan tahun 1994 lalu menyatakan bahwa akses perempuan Asia untuk terjun kebidang politik, masih rendah. Hal ini disebabkan perempuan Asia pada umunya masih terbelenggu masalah klasik yakni adanya diskriminasi, kurangnya dana dan dukungan. Konferensi yang dihadiri para perempuan politisi dan akademisi serta organisasi swadaya itu bertujuan mencari solusi bagaimana caranya meningkatkan peranan perempuan dalam bidang politik, bidang yang secara tradisional dikuasai kaum laki-laki.

Seorang politisi sekaligus ilmuwan perempuan dari Bangladesh, Rounaq Johan mengatakan bahwa dari seluruh perempuan yang ada di muka bumi ini, hanya 10% saja yang menduduki jabatan sebagai anggota parlemen. Sementara yang beroleh jabatan anggota kabinet (menteri) hanya 4%. Di Asia, tercatat hanya 6 perempuan yang (pernah) berhasil merebut posisi kepala negara, yakni Indira Gandhi di India, Sirimaaro Bandaranaike di Srilangka, Benazir Bhuto di Pakistan, Khaleda Zia di Banglades, Corazon Aquino di Filipina dan Megawati Soekarno Putri di Indonesia. 61

Di Indonesia sejak reformasi, partisipasi politik perempuan khususnya keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan menjadi agenda penting pemerintah dan legislatif. Berbagai kebijakan afirmasi dan penguatan terus diupayakan. Dalam demokrasi inklusif, masyarakat sebagai salah satu pilar penting demokrasi mempunyai peranan yang sangat penting untuk mewujudkan partisipasi politik perempuan yang lebih luas dan bermakna.

Hak politik perempuan tertuang dalam konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW-The Conventionon The Elemination of All Forms of Discrimination Againts Women) disahkannya Undang-undang No. 7 tahun 1984 yang diterima oleh dewan umum PBB pada tahun 1979. Bila dicermati dalam kancah perpolitikan perempuan dari segi keterwakilan perempuan baik di dataran eksekutif, yudikatif dan legislatif sebagai badan yang memegang peran kunci penetapan kebijakan politik, pengambilan keputusan dan menyusun berbagai piranti hukum, perempuan masih tertinggal jauh dibandingkan dengan lakilaki.

⁶¹ Syarifah Qamariah, Jurnal Annisa'

Dengan disahkannnya Undang-undang No. 7 tahun 2004 tentang pemilu yang menyertakan aspirasi kaum perempuan pada pasal 65 ayat 1 Undang-undang No. 12 Tahun 2003, tercantum setiap partai politik dapat mengajukan calon anggota DPR baik DPR RI, DPR propinsi, dan DDPR Kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.

Partisipasi perempuan dalam politik dapat meningkatkan kesejahteraan semua kelompok terutama perempuan dengan mewakili, mengawal dan mempengaruhi agenda dan proses pembuatan kebijakan, serta turut serta dalam proses pembangunan termasuk merumuskan kebijakan tentang pendidikan berkeadilan gender bagi masyakat. Namun dalam praktiknya representasi politik perempuan di parlemen masih di bawah target kuota 30%. Padahal hasil survei WRI menyatakan masyarakat Indonesia setuju jika perempuan dan laki-laki diberikan kesempatan yang sama untuk terlibat di bidang politik.

Kesimpulan

Potret perempuan dalam ranah politik di Indonesia cukup signifikan,tercatat nama-nama perempuan yang turut andil dalam aktivitas politik baik sebelum maupun setelah Indonesia merdeka dari jaman kerajaan hingga terbentuk menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Perjuangan fisik melawan penjajah telah mengabadikan nama-nama seperti Cut Nyak Dien, Martha Tiahahu, Yolanda Maramis dan sebagainya. Dalam pergerakan nasional muncul nama Rasuna Said dan Trimurti. Sedangkan RA Kartini dan Dewi Sartika, telah terpahat nama-nama mereka sebagai orang yang memperjuangkan hak-hak perempuan untuk memperoleh pendidikan yang setara dengan pria. Era Orde Baru telah melapangkan jalan bagi para perempuan untuk aktif berkiprah dalam segala aspek kehidupan termasuk politik. Berbagai bentuk perjuangan politik telah digeluti para perempuan, seperti parlemen, kabinet, partai politik, LSM, dan sebagainya. Meskipun secara tradisional dunia politik dan tahta kekuasaan dikuasai kaum lakilakinamun di Indonesia secara umum keterlibatan perempuan dalam dunia politik cukup tinggi dan signifikan terbukti dalam pilkada serentak 2018 banyak politisi perempuan memenangkan pilkada baik di level gubernur, bupati maupun wali kota.

Daftar Pustaka

- Adji, Krishna Bayu dan Sri Wintala Achmad, *Perempuan-Perempuan Tangguh Penguasa Tanah Jawa* Cet. I; Yogyakarta: Araska, 2018.
- Danim, Sudarwan. Agenda Pembaruan Sistem pendidikan Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Hamka, Buya Hamka Berbicaara tentang Perempuan Cet. V; Jakarta: Gema Insani, 2014.
- Hasyim, Syafiq. *Hal-Hal yang Tak Terpikirkan tentang isu-isu Keperempuanan dalam Islam*Cet. I; Bandung: Mizan, 200.
- Manoppo, Rukmina G. Meretas Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam Cet. I; Malang: Universitas Negeri Malang, 2012.
- Muh. Jamil, http://www.hukumpedia.com/JAMILNCERA/peran-perempuan-dalam-dunia-politik-dijamin-undang-undang, didownlod pada tanggal 30 September 2016
- Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah. Cet. II; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Mulia, Musdah. Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan keadilan Gender Cet. I; Yogyakarta: Nauvan Pustaka, 2014.
- Mulia, Musdah. Kemuliaan Perempuan dalam Islam Cet. I; Jakarta: Megawati Insitute, 2014.
- Nata, Abuddin. Studi Islam Komprehensif Cet. I; Jakarta: Kencana, 2011.
- Nuruzzaman, dkk. Islam Agama Ramah Perempuan Cet. IV; Yogyakarta: LKis, 2013.